

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai Bali Democracy Forum sebagai salah satu forum penting bagi Indonesia dalam membentuk citranya sebagai negara demokrasi. Dengan begitu, kehadiran forum ini dapat dijadikan salah satu strategi Indonesia dalam melakukan diplomasi publiknya. Hal ini selaras dengan penelitian Ma'mun (2012) yang menyatakan bahwa tujuan diplomasi publik yakni membangun citra yang baik dari suatu negara yang didasari oleh pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman.

Bali Democracy Forum sebagai forum internasional pertama mengenai demokrasi di kawasan Asia Pasifik telah memberikan wadah diskusi bagi negara-negara pesertanya dengan *sharing experiences and best practices* dengan prinsip non-intervensi dan menghargai setiap konsep demokrasi yang diusung oleh negara-negara peserta Bali Democracy Forum. Hal ini disampaikan dalam penelitian Rosyidin (2020) mengenai Bali Democracy Forum bahwa Bali Democracy Forum tidak mendikte negara lain untuk mengimplementasikan demokrasi dengan format tertentu, tidak pula menjadi forum untuk mengkritisi atau menyalahkan rezim non-demokratik melainkan sebagai arena diskusi.

Dengan memberikan ruang diskusi dan komunikasi dua arah, Bali Democracy Forum dapat menumbuhkan *mutual understanding* antar negara pesertanya yang akhirnya membentuk persepsi dan citra positif terhadap Indonesia sebagai negara inisiator forum tersebut. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Cowan dan Arsenault (2008) bahwa diplomasi publik yang baik tidak dapat lagi berbasis monolog namun perlu berbasis dialog yang memfasilitasi komunikasi dua arah atau multi-arah dengan berbagai pihak untuk merangsang inisiatif kolaborasi.

Pembahasan mengenai Bali Democracy Forum ini menjadi penting untuk dibahas terutama di era pandemi ketika pertemuan tatap muka menjadi terbatas. Peneliti melihat bahwa Bali Demokrasi Forum tetap mengupayakan berlangsungnya diplomasi publik Indonesia meskipun pertemuan tatap muka dibatasi terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Peneliti menaruh perhatian pada penerapan teknologi yang digunakan untuk mengatasi kendala terkait pertemuan tatap muka untuk melakukan diplomasi publik melalui suatu forum internasional. Selain itu, tema yang diusung pada Bali Democracy Forum di tahun 2020 dan 2021 menjadi sangat penting bagi banyak negara karena berkaitan dengan keadaan dunia yang sedang menghadapi tantangan demokrasi di era pandemi. Atas alasan tersebut, Bali Democracy Forum mengusung tema “*Democracy and COVID-19 Pandemic*” di tahun 2020 dan pada tahun 2021 diusung tema “*Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic*”. Kedua tema tersebut berupaya menaruh fokus terhadap demokrasi di era pandemi berikut diskusi tentang upaya yang dilakukan oleh negara dunia untuk menghadapi keadaan tersebut.

Kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi besar dalam Ilmu Hubungan Internasional khususnya terkait diplomasi publik dan kerjasama antar negara melalui diskusi pada forum internasional untuk mencapai kepentingan nasional dari masing-masing negara. Peneliti menaruh perhatian pada kepentingan nasional Indonesia untuk membangun citranya sebagai negara demokrasi melalui forum tersebut. Bali Democracy Forum sebagai salah satu strategi Indonesia untuk dapat berperan dalam demokrasi internasional yang telah diterima dan diakui oleh entitas global sebagai ruang diskusi (Fawwaz, 2020).

Berangkat dari harapan tersebut, pembahasan mengenai Bali Democracy Forum dan diplomasi publik di era pandemi akan dibahas secara lebih jauh melalui penelitian ini. Bagi penulis, kajian ini sangat penting untuk dibahas karena berkaitan dengan bagaimana upaya Indonesia untuk tetap melaksanakan diplomasi publiknya di tengah kondisi pandemi. Bali Democracy Forum sebagai program tahunan yang telah ada sebelumnya

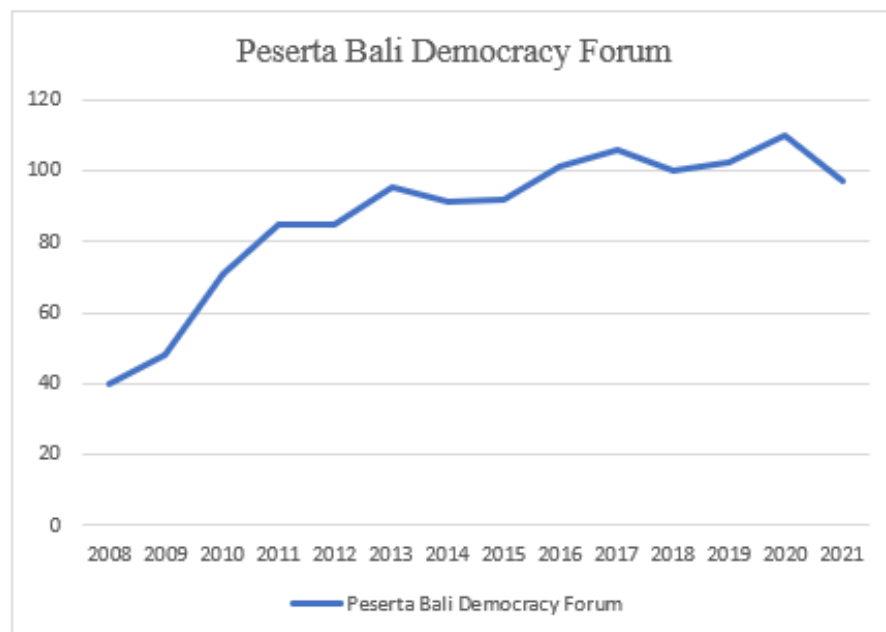
dapat menjadi strategi bagi Indonesia untuk tetap menjalankan diplomasi publiknya meskipun terbatas pandemi. Dengan melibatkan banyak partisipasi negara lain, forum tersebut dapat membantu Indonesia untuk membangun citranya sebagai negara demokrasi.

Bali Demokrasi Forum memiliki peran strategis bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Bali Democracy Forum merupakan forum diskusi mengenai demokrasi yang diinisiasi Indonesia pada tahun 2008 yang dihadiri oleh pemerintah negara-negara untuk membahas mengenai perkembangan demokrasi terutama di kawasan Asia Pasifik. Bali Democracy Forum berhasil menunjukkan peran Indonesia untuk menginisiasi perkumpulan negara-negara di dalam dan luar kawasan Asia Pasifik yang memperlihatkan citra negara Indonesia yang menerapkan nilai-nilai demokratis (Djemat, 2021). Bali Democracy Forum menjadi forum antar pemerintah pertama di Asia yang membahas mengenai demokrasi. Bali Democracy Forum menjadi forum terbuka dan inklusif bagi negara yang memiliki tujuan untuk mempromosikan dan memajukan proses demokrasinya terutama di wilayah Asia Pasifik. Indonesia memiliki peran besar untuk mempromosikan hal tersebut sebagai inisiator Bali Democracy Forum (Anggareni & Indrawati, 2020).

Berdasarkan data yang didapat, peneliti melihat bahwa terdapat kecenderungan naiknya partisipasi negara dunia terhadap Bali Democracy Forum. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketertarikan negara dunia untuk ikut berpartisipasi dalam forum tersebut untuk ikut berdiskusi melalui *sharing experience and best practices* mengenai demokrasi. Tahun pertama penyelenggaraan Bali Democracy Forum pada tanggal 10-11 Desember 2008 mengangkat tema “*Building and Consolidating Democracy as Agenda for Asia*” yang dihadiri oleh 32 negara peserta sebagai partisipan dan 8 negara/organisasi internasional sebagai peninjau dan dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Bali Democracy Forum merupakan forum *inter-governmental* pertama di Asia mengenai demokrasi (Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Bali Democracy Forum 2008). Pada tahun kedua, Bali Democracy Forum diikuti oleh 35

negara sebagai partisipan dan 13 negara/organisasi internasional sebagai peninjau. Dalam pidato pembukanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi fokus pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Menurutnya, partisipasi demokrasi di Indonesia memiliki animo yang luar biasa dengan keikutsertaan 84% dari total pemilih atau 128 juta pemilih yang berimplikasi pada partisipasi demokrasi di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, angka partisipasi dari forum tersebut cenderung meningkat.

Gambar 1 Grafik Peserta Bali Democracy Forum



Sumber: Buku Bali Democracy Forum 1-14

Bali Democracy Forum dari tahun ke tahun juga terus berinovasi untuk memberikan wadah bagi pesertanya untuk belajar dengan melakukan *sharing experience* dan *best practices*. Untuk itu, Bali Democracy Forum terdiri 2-4 pilar atau sub tema sebagai arena diskusi mengenai tema yang berbeda satu sama lain yang disesuaikan dengan kondisi dunia. Selain itu, terdapat juga forum turunan (*side event*) yang berada di bawah Bali Democracy Forum yang akan membahas isu tertentu dengan lebih dalam yang bekerja sama dengan pihak lain yang dalam hal ini adalah organisasi yang berkaitan dengan

demokrasi. Beberapa *side event* yang diselenggarakan melibatkan pelajar, mahasiswa, media, organisasi sosial, pelaku bisnis, dan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan ruang untuk melakukan lebih banyak diskusi yang nantinya dapat menghasilkan ide atau gagasan dari tukar pengalaman yang dilakukan pada masing-masing forum turunan maupun sub bahasan sehingga dapat diterapkan oleh pesertanya setelah mengikuti forum tersebut.

Terdapat beberapa forum serupa mengenai demokrasi yang diselenggarakan di berbagai lembaga pemerintah maupun organisasi sosial. Salah satunya adalah World Forum for Democracy yang diselenggarakan oleh Council of Europe. Forum ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2012 dan masih berlangsung sampai saat ini. Forum ini lebih berfokus pada isu-isu demokrasi di kawasan Eropa. Jika dilihat dari susunan kegiatannya, forum ini memiliki lebih banyak rangkaian kegiatan yang dilangsungkan secara tematik seperti *youth assembly, exhibition, debate, plenary, working sessions, and conference*. Dengan begitu, terdapat lebih banyak pihak yang terlibat. Selain itu, waktu pelaksanaan juga lebih panjang jika dibandingkan dengan Bali Democracy Forum. Pada 2012, forum ini diselenggarakan pada 6-20 Oktober 2012.

Pada World Forum of Democracy, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan umumnya bersifat satu arah antara pembicara dan audiens. Hal ini berbeda dengan Bali Democracy Forum yang lebih mengarah pada diskusi dengan *sharing experiences* dan *best practices* terhadap isu-isu tertentu terkait demokrasi. Dengan adanya komunikasi dua arah, gagasan yang disampaikan dan komunikasi menjadi lebih intens sehingga lebih banyak ide-ide mengenai demokrasi yang dapat disampaikan tidak hanya dari pembicara namun juga peserta. Selain itu, World Forum for Democracy yang diselenggarakan oleh Council of Europe lebih banyak dihadiri oleh NGO dan beberapa perwakilan pemerintah kota atau daerah yang dapat dikatakan hanya berperan sebagai pendorong untuk membuat kebijakan bagi negaranya namun tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan hal tersebut.

Hal ini berbeda dengan Bali Democracy Forum yang diselenggarakan oleh pemerintah negara yang mengundang pemerintah negara lain mulai dari presiden, menteri luar negeri, atau perwakilan yang diutus oleh negara yang dalam keterlibatannya memiliki wewenang untuk membuat kebijakan bagi negaranya sehingga hasil dari keikutsertaannya dalam Bali Democracy Forum dapat menjadi acuan atau pertimbangan untuk membuat kebijakan mengenai demokrasi dengan melihat atau bertukar pengalaman melalui wadah diskusi yang diberikan dalam Bali Democracy Forum.

Bali Democracy Forum menjadi penting dan memiliki urgensi dalam meningkatkan demokrasi di negara-negara yang terlibat. Salah satu yang dapat dilihat yakni mengenai transisi demokrasi di Myanmar sebagai salah satu negara peserta Bali Democracy Forum. Bali Democracy Forum telah memberikan memberikan pengaruh positif dengan inspirasi, motivasi, dan membantu memfasilitasi transisi demokrasi di Myanmar untuk meningkatkan nilai indeks demokrasi setiap tahunnya (Rizky & Zamzami, 2019). Bali Democracy Forum memang memberikan pengaruh positif pada transisi demokrasi Myanmar, meskipun tidak dapat dikatakan Bali Democracy Forum sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan perubahan demokrasi di Myanmar (Mustikawati, 2013).

Selain Myanmar, negara Fiji yang juga merupakan salah satu negara peserta Bali Democracy Forum yang sebelumnya mengalami pergantian pemerintahan melalui kudeta yang bukan merupakan cara demokratis dan melanggar norma demokratis itu sendiri (Moon, 2014). Menurut Duta Besar Wahid Supriyadi sebagai kepala Multinational Observer Group for Fijian Election 2014, pemerintah Fiji mau mengikuti Bali Democracy Forum karena Fiji merasa dapat belajar dan terinspirasi terkait penerapan demokrasi melalui Bali Democracy Forum (Angreini, 2020). Dengan pengaruh yang dihasilkan oleh Bali Democracy Forum, hal tersebut mendorong negara lain untuk berpartisipasi dengan pertimbangan Indonesia sebagai *leading forces* untuk demokrasi, telah berlangsung selama 14 tahun dan memberikan pengaruh penerapan demokrasi dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik bagi

negara lain dan diikuti oleh banyak negara dengan visi memperbaiki demokrasi di negaranya.

Bali Democracy Forum mampu menjadi wadah belajar dengan *sharing experiences* dan *best practices*. Indonesia pun tidak memaksa peserta Bali Democracy Forum untuk mengadopsi demokrasi juga tidak mengkritik urusan internal negara lain (Rosyidin, 2020). Dengan begitu, terdapat alasan kuat untuk menjadi kegiatan tahunan Bali Democracy Forum sebagai wadah negara dunia untuk belajar mengenai demokrasi secara sukarela melalui forum tersebut. Bali Democracy Forum memperkuat praktek demokrasi di Indonesia dan terbukti dengan adanya pengakuan dari luar negeri terhadap hal tersebut. Bali Democracy Forum memperkuat praktek demokrasi di Indonesia dan terbukti dengan adanya pengakuan dari luar negeri terhadap hal tersebut (Albayumi, 2014).

Namun, penyelenggaraan Bali Democracy Forum juga menimbulkan perdebatan di kemudian hari terutama mengenai pesertanya. Beberapa negara yang ikut dalam Bali Democracy Forum dengan komitmen untuk melakukan demokrasi justru tidak menerapkan demokrasi di negara bahkan cenderung melukai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Contoh kasus yang dapat kita ambil adalah kudeta di Myanmar pada tahun 2021 dan kekerasan HAM terhadap masyarakat di Myanmar yang tidak sesuai dengan demokrasi. Kudeta tersebut memicu unjuk rasa besar-besaran yang terjadi dan disertai mogok kerja di berbagai wilayah Myanmar. Respon represif juga dilakukan oleh militer terhadap warga sipil di Myanmar (Roza, 2021). Selain itu, dapat dilihat gagalnya demokratisasi di Afghanistan yang berkaitan dengan konflik sipil yang masih berlanjut dengan keamanan dan politik yang masih rendah yang mengurangi indeks dari demokrasi di Afghanistan (Khurun'in, 2017). Untuk itu, Bali Democracy Forum dapat merumuskan lebih jauh terkait upaya-upaya mewujudkan demokrasi melalui *sharing experience and best practises*.

Meskipun begitu, dari latar belakang mengenai penyelenggaraan Bali Democracy Forum, peneliti melihat bahwa terdapat kecenderungan meningkatnya peserta forum tersebut dari tahun ke tahun. Partisipasi dari

negara dunia baik dari kawasan Asia Pasifik maupun dari kawasan lain terus meningkat. 14 tahun Bali Democracy Forum telah membantu negara-negara pesertanya dengan memberi pandangan untuk peningkatan demokrasi yang dapat diimplementasikan melalui kebijakan di setiap negara. Hal ini menunjukkan kepercayaan negara dunia terhadap Indonesia sebagai inisiator forum tersebut mengenai demokrasi dan keinginan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik dengan cara bertukar ide dan gagasan dalam Bali Democracy Forum dapat menjadi alasan agar Bali Democracy Forum tetap terus berjalan. Bali Democracy Forum mampu menjadi media untuk mempromosikan demokrasi yang tumbuh di Indonesia yang menerapkan budaya toleransi dan harmoni yang merupakan ciri dari negara-negara Asia yang menghormati norma-norma dan menghindari intervensi serta menghormati urusan dalam negeri negara lain (Rosyidin, 2020).

Bali Democracy Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia hadir sebagai salah satu cara diplomasi publik Indonesia pada era pandemi, khususnya sekitar tahun 2020-2021 ketika pandemi sedang melanda negara dunia. Forum ini tetap terlaksana dengan format kegiatan yang berbeda menyesuaikan dengan situasi pandemi. Kegiatan diadakan secara *hybrid* untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Namun, kegiatan ini tetap melibatkan banyak negara sehingga mampu menjadi media untuk melakukan diplomasi publik di era pandemi 2020-2021 dengan banyaknya partisipasi negara lain yang terlibat. bahwa Bali Democracy Forum mampu membentuk persepsi negara dunia bahwa Indonesia dapat berperan dalam menjaga ketertiban dan perdamaian internasional (Djemat, 2021).

Sejak awal hadirnya Bali Democracy Forum di tahun 2008, Bali Democracy Forum selalu menerapkan sistem diskusi secara langsung antara perwakilan negara atau organisasi internasional di satu tempat yang sama. Dengan adanya perubahan situasi kondisi yang mendadak akibat pandemi dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang tidak terduga, maka perlu ada berbagai penyesuaian untuk acara tersebut. Perubahan tersebut perlu menyesuaikan dengan keadaan yang berlaku. Perubahan yang disesuaikan

dalam Bali Democracy Forum adalah konsep acara yang terbagi menjadi dua yakni secara *hybrid* (daring dan luring). Undangan yang tadinya hanya terbatas pada perwakilan luar negeri dengan kuota tertentu menjadi lebih banyak lagi yang dapat ikut serta dalam Bali Democracy Forum secara daring.

Peneliti melihat dengan dedikasi yang diberikan oleh hadirnya Bali Democracy Forum, forum ini termasuk salah satu forum diskusi terbesar mengenai demokrasi yang diselenggarakan oleh Indonesia serta melibatkan banyak negara dunia yang memiliki visi misi serupa untuk meningkatkan demokrasi di negaranya perlu terus berlangsung meskipun terbatas oleh situasi pandemi COVID-19. Beberapa alasan Bali Democracy Forum tetap harus berjalan di tengah pandemi yakni sesuai dengan tema yang diusung untuk mendiskusikan langkah demokrasi yang perlu diterapkan selama pandemi yang menimbulkan masalah baru di berbagai aspek demokrasi.

Selain membahas tentang demokrasi, Bali Demokrasi Forum juga menjadi ajang untuk Indonesia melakukan diplomasi publik. Hal ini berkaitan dengan Bali Democracy Forum yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia serta Indonesia pula yang menjadi tuan rumah dari forum ini di setiap tahunnya. Bali Democracy Forum dapat menjadi wadah Indonesia dalam membentuk citranya, terutama mengenai demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sebagai negara demokrasi. Serta, forum ini menjadi wadah untuk berelasi dan menjalin hubungan dengan negara lain yang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dilihat dari besarnya partisipasi negara dunia dan keterlibatan berbagai kalangan dalam Bali Democracy Forum, peneliti melihat bahwa Bali Democracy Forum dapat menjadi salah satu jalan bagi Indonesia dalam melakukan diplomasi publiknya dengan menarik perhatian dari berbagai kalangan dengan melakukan komunikasi dua arah dan dialog. Diplomasi publik melalui dialog merupakan salah satu cara paling efektif dalam membentuk opini publik dan mencapai kepentingan nasional negara secara publik (Urazayeva, 2020). Tidak hanya pemerintah negara dunia saja, namun

juga pelajar, pelaku bisnis, media, masyarakat sipil internasional, dan beberapa kalangan lain yang terlibat dalam rangkaian kegiatan Bali Democracy Forum.

Dalam buku Jammes Pamment (2013), diplomasi publik merupakan komunikasi internasional yang melibatkan aktor seperti kementerian luar negeri, organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil melalui metode komunikasi seperti penjangkauan media, konferensi dan acara, proyek kolaboratif dan pertukaran budaya, individu atau siswa. Upaya diplomasi yang tadinya hanya melalui upaya-upaya diplomasi formal seperti dalam pidato-pidato kenegaraan, kebijakan publik yang dibuat oleh suatu negara, penokohan dalam suatu aktivitas internasional, dan sebagainya kini bergeser ke arah interaksi dua arah atau lebih yang kemudian melahirkan *sense*, membentuk opini, hingga membentuk citra dari sebuah negara.

Eytan Gilboa (2008) menyampaikan bahwa banyak media yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam diplomasi publik termasuk konferensi publik tahunan, proyek penelitian bersama multinasional, publikasi tahunan dan berkala, pusat penelitian, program pascasarjana, dan lembaga pelatihan jangka pendek. Hal ini didukung dengan perubahan bentuk diplomasi dengan tujuan mencapai lebih banyak audiens publik sehingga dampak dapat lebih dirasakan dan melekat terhadap citra suatu negara.

Dalam implementasinya, peneliti melihat diplomasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui aktivitas atau kegiatan yang melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi sehingga meningkatkan atensi dari pihak-pihak terlibat. Keterlibatan banyak pihak inilah yang kemudian membentuk pandangan dari masing-masing pihak terhadap aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan sehingga citra dari suatu negara dapat terbentuk. Aktivitas atau kegiatan yang dijalankan dapat bermacam-macam bentuknya. Misalnya partisipasi dalam forum internasional, interaksi internasional, keterlibatan suatu negara terhadap isu internasional, festival kebudayaan dan makanan, serta berbagai kegiatan atau

aktivitas lain yang melibatkan partisipasi publik serta menarik perhatian publik.

Melalui Bali Democracy Forum, disediakan ruang diskusi untuk menumbuhkan hal tersebut sehingga mampu membantu pembentukan persepsi negara dunia terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi yang merupakan citra positif dari Indonesia. Fokus dari diplomasi publik yang dilaksanakan Indonesia menonjolkan pada instrumen pertukaran politik dan budaya sebagai strategi terbaik yang dilakukan melalui pertukaran gagasan, nilai, dan budaya termasuk pada Bali Democracy Forum yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri yang menonjolkan demokrasi sebagai ciri khas Indonesia (Achsinn & Nadhifa, 2018).

Dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi pertemuan tatap muka, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan untuk tetap menjalankan kegiatan meskipun secara daring. Salah satu cara menyiasatinya dengan diplomasi digital melalui *event online*. Acara yang dilaksanakan secara *online* membutuhkan lebih sedikit pembiayaan, memangkas waktu yang kurang efektif, dan memaksimalkan sumber daya manusia yang mungkin kurang (Viktoria, 2022).

Dalam Bali Democracy Forum 2020-2021, dibutuhkan berbagai media teknologi daring yang menunjang jalannya acara tersebut. Media yang digunakan yakni melalui aplikasi Zoom untuk melakukan konferensi secara daring sehingga peserta yang tidak dapat hadir langsung di lokasi tetap dapat mengikuti forum tersebut secara daring. Pemanfaatan diplomasi digital telah memasuki gelombang ketiga yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari upaya kombinasi tatap muka, *physical diplomacy* dengan keterlibatan visual melalui platform konferensi video seperti Zoom, Teams, atau Webex. Bentuk adaptasi digital ini lebih cepat dan lebih langsung dirasakan daripada sebelumnya (Bjola & Manor, 2022). Pemanfaatan berbagai media dan teknologi yang perlu dipersiapkan dalam waktu singkat itu memberikan perubahan bagi diplomasi publik Indonesia. Diplomasi publik yang tadinya memerlukan tatap muka atau cara konvensional bergeser

ke diplomasi digital yang sangat memanfaatkan internet berikut media penunjangnya.

Pemanfaatan teknologi digital memberi perubahan terhadap upaya diplomasi publik. Perbedaan paling terlihat dari pemanfaatan teknologi digital adalah perubahan jangkauan dari diplomasi publik itu sendiri. Dengan pemanfaatan media digital, diplomasi publik telah melewati hambatan waktu dan tempat karena dapat dilakukan dari berbagai wilayah dunia untuk tetap berpartisipasi dengan waktu yang berbeda. Jangkauan juga semakin luas dengan partisipasi yang semakin tinggi. Selain itu, partisipasi tidak hanya terbatas pada undangan dari Bali Democracy Forum sendiri yang diwakili oleh perwakilan dari berbagai negara namun juga melibatkan banyak pihak di tahun 2020-2021 seperti pelajar, pebisnis, media, dan masyarakat sipil. Suara-suara dari berbagai kelompok tersebut dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pengelolaan demokrasi di masing-masing negara khususnya ketika berhadapan dengan pandemi dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh berbagai kalangan selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Dengan latar belakang di atas, peneliti melakukan studi pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik Bali Democracy Forum sebagai diplomasi publik Indonesia. Penelitian terdahulu yang mengenai topik tersebut kemudian dijadikan referensi dalam penelitian ini. Penelitian Rosyidin (2020) berjudul *Promoting a home-grown democracy: Indonesia's approach of democracy promotion in the Bali democracy Forum (BDF)* dalam argumennya mengkritik mengenai perbedaan antara demokrasi barat yang berbeda dengan demokrasi yang ada di Asia. Indonesia melalui Bali Democracy Forum memberi ruang bagi negara-negara dunia khususnya di Asia Pasifik untuk mendiskusikan mengenai demokrasi melalui forum tersebut. Bali Democracy Forum kemudian dapat digunakan sebagai alat bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan dalam mempromosikan bentuk-bentuk demokrasi negara lain. Terdapat argumen bahwa demokrasi yang ada di Indonesia dan negara-negara lain khususnya di kawasan Asia memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan

nilai-nilai dan norma Asia dan dapat menjadi identitas bagi suatu negara. Demokrasi yang berupa identitas Indonesia bukan hanya nilai politik namun juga *soft power* yang dapat digunakan untuk mencapai *national interest*.

Melalui Bali Democracy Forum, ditekankan mengenai dialog dan toleransi yang menggunakan pendekatan '*leading by tolerant example*'. Atas dasar tersebut Bali Democracy Forum telah menjadi strategi alternatif dalam promosi demokrasi sehingga Bali Democracy Forum perlu untuk tetap berjalan. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Albayumi (2014) berjudul Peran Bali Democracy Forum dalam Demokrasi Indonesia yang berargumen bahwa Bali Democracy Forum berupaya memegang teguh prinsip *home-grown democracy* yakni berlandaskan pada nilai demokrasi yang dipegang oleh masing-masing negara peserta Bali Democracy Forum yang tidak bertendensi untuk menyalahkan atau membenarkan praktik demokrasi yang dijalankan oleh negara peserta Bali Democracy Forum.

Pada penelitian lain, terdapat bahasan bagaimana Bali Democracy Forum dapat menjadi sarana diplomasi publik Indonesia. Hal ini sesuai dengan topik penelitian pada tulisan ini. Djemat (2021) melalui penelitiannya yang berjudul Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bali Demokrasi Forum berargumen bahwa diplomasi publik adalah suatu hal yang penting bagi suatu negara dan Bali Democracy Forum dapat menjadi sarana diplomasi publik Indonesia. Bali Democracy Forum dapat menjadi sarana dalam mempromosikan pembangunan demokrasi Indonesia melalui dialog dan tukar pengalaman antar negara peserta.

Selain itu, Bali Democracy Forum kemudian menciptakan wadah kerjasama bagi negara pesertanya untuk membangun demokrasi. Jumlah negara peserta Bali Democracy Forum pun terus meningkat. Dengan begitu, Indonesia sebagai inisiator Bali Democracy Forum harus mampu mengambil keuntungan dari forum tersebut sebagai strategi diplomasi publik untuk menunjukkan citra Indonesia yakni sebagai negara dengan nilai-nilai demokratis. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Wilyam Lie dan Muhnizar Siagian (2018) yang berargumen bahwa dalam diplomasi, citra

negara memegang peranan penting dan Indonesia dapat melakukan diplomasi publiknya melalui Bali Democracy Forum. Bali Democracy Forum merupakan salah satu arena bagi Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono untuk memulihkan catatan buruk demokrasi Indonesia pada era Orde Baru.

Bali Democracy Forum telah menjadi forum internasional yang berupaya untuk memberikan pengaruh positif mengenai demokrasi bagi negara pesertanya. Penelitian Oktaria Mawarni dan Anggun Puspitasari (2018) yang berjudul *Strategi Sphere of Influence* Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi melalui Bali Democracy Forum (BDF) berargumen bahwa Indonesia dapat menerapkan strategi yang efektif untuk memperluas pengaruhnya. Bali Democracy Forum berperan sebagai *bridge builder* untuk menjembatani kepentingan negara-negara pesertanya mengenai demokrasi. Bali Democracy Forum dapat digunakan untuk memperluas *sphere of influence* (lingkup pengaruh) Indonesia ke skala internasional mengenai pembahasan demokrasi yang kemudian menjadi media promosi identitas Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian bahwa di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menjadikan isu demokrasi sebagai promosi dan sasaran utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia melalui Bali Democracy Forum. Indonesia dapat melakukan promosi demokrasi melalui Bali Democracy Forum (Karim, 2016).

Penelitian lainnya oleh Yolla Angreni dan Indrawati (2020) berjudul *Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bali Democracy Forum Sebagai Bagian dari Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia* berargumen bahwa kebijakan Indonesia terkait kawasan asia untuk mempromosikan demokrasi di kawasan Asia Pasifik maupun luar Asia Pasifik dan menekankan penggunaan *soft power* untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Fokus politik luar negeri Indonesia dengan slogan “*Thousand Friend Zero Enemy*” membuka jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara salah satunya melalui Bali Democracy Forum untuk menjadi media belajar mengenai praktik demokrasi. Indonesia melalui Bali Democracy Forum telah menunjukkan kemampuannya untuk dapat mengumpulkan negara-negara

untuk hadir dalam forum tersebut dan berdiskusi mengenai proses demokrasi di negara masing-masing.

Melalui Bali Democracy Forum, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan negara lain mengenai praktik demokrasi. Kerjasama tersebut tercermin dari kolaborasi dengan *Institute for Peace and Democracy* (IPD) serta pembentukan forum-forum lain di bawah Bali Democracy Forum seperti *Bali Democracy Student Conference (BDSC)* dan *Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF)* yang melibatkan banyak negara. Hal ini mendukung slogan “*Thousand Friend Zero Enemy*” yang berpengaruh terhadap terbukanya Indonesia untuk peluang kerjasama dan diplomasi di dunia internasional (Mashad, 2008).

Bagi Indonesia, demokrasi dapat menjadi salah satu ‘senjata’ dalam melakukan diplomasi publiknya. Wardhany (2008) berargumen bahwa Bali Democracy Forum yang merupakan forum demokrasi internasional yang digagas Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan diplomasi publik Indonesia dengan menggunakan nilai-nilai demokrasi sebagai instrumen utama.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu mengenai diplomasi publik Indonesia melalui Bali Democracy Forum dengan penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai diplomasi publik Indonesia melalui Bali Democracy Forum di era pandemi yang mengalami banyak perubahan format dan bentuk kegiatan. Selain itu, pada penelitian terdahulu belum terdapat penjelasan mengenai peran dari penerapan teknologi dalam upaya diplomasi publik khususnya pada Bali Democracy Forum. Meskipun begitu, penelitian terdahulu memiliki peran penting bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Peneliti perlu memahami konsep diplomasi publik dan Bali Democracy Forum dari mempelajari penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu mengenai diplomasi publik melalui Bali Democracy Forum menyajikan data-data yang akan dibutuhkan peneliti untuk melengkapi

penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memahami bagaimana diplomasi publik Indonesia dilakukan melalui Bali Democracy Forum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan berfokus pada pelaksanaan diplomasi publik melalui Bali Democracy Forum di era pandemi dan penerapan teknologi digitalisasi dalam forum tersebut. Studi ini penting untuk memahami bagaimana diplomasi publik Indonesia berjalan melalui Bali Democracy Forum dan apa kaitannya dengan penerapan teknologi digitalisasi dalam forum tersebut. Atas dasar tersebut, peneliti mengusung judul *Diplomasi Publik Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 Melalui Bali Democracy Forum Tahun 2020-2021*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka muncul rumusan masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut yakni:

- 1. Bagaimana *new public diplomacy* Indonesia di era pandemi melalui Bali Democracy Forum 2020-2021?**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Praktis:

Penelitian ini berupaya untuk mendefinisikan upaya yang dilakukan Indonesia dalam melakukan diplomasi publik di era pandemi melalui Bali Democracy Forum 2020-2021 yang dapat menjadi acuan untuk upaya diplomasi publik selanjutnya melalui forum atau kegiatan lain.

2. Tujuan Teoritis:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan tentang karakteristik diplomasi publik baru dan digitalisasi diplomasi publik di Indonesia melalui kegiatan Bali Democracy Forum di era pandemi pada tahun 2020-2021 yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi maupun studi literatur dalam mempelajari diplomasi publik di era pandemi oleh pemerintah Indonesia atau materi terkait maupun sebagai pertimbangan menyusun strategi selanjutnya mengenai diplomasi publik di Indonesia melalui Bali Democracy Forum.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran serta penjabaran mengenai penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini secara keseluruhan, penelitian ini terbagi menjadi 6 (bagian) yang kemudian disebut dengan bab. Tiap-tiap bagian bab memiliki sub-bab yang berkaitan dengan topik bahasan. Bab tersebut terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab pertama terbagi menjadi 5 bagian sub-bab. Secara keseluruhan bab ini menjelaskan mengenai latar belakang topik yang dibahas yang mencakup penjelasan awal terkait masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari diplomasi publik Indonesia melalui Bali Democracy Forum di era pandemi. Bab ini juga mencakup awal mula hadirnya Bali Democracy Forum, sejarah singkat, perdebatan, serta alasan tetap dijalankannya diplomasi publik Indonesia melalui Bali Demokrasi Forum. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini memuat konsep dan teori penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis topik masalah pada penelitian untuk mencari jawaban dari masalah pada penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni tentang konsep diplomasi publik dan digitalisasi dalam diplomasi publik di era pandemi. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka penelitian yang merupakan gambaran umum dan alur pemikiran peneliti dalam

menyelesaikan masalah mulai dari rumusan masalah hingga menghasilkan jawaban dan temuan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga ini terbagi menjadi 6 sub-bab yang membahas detail dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Sub-bab tersebut terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rancangan waktu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara dan studi kepustakaan mengenai Bali Democracy Forum.

Bab IV Diplomasi Publik Indonesia di Era Pandemi Melalui Bali Democracy Forum Pada Tahun 2020-2021

Bab keempat berisi penelitian mengenai diplomasi publik Indonesia di era pandemi melalui Bali Democracy Forum pada tahun 2020-2021 dengan sub bahasan:

4.1 Bali Democracy Forum

Sub bab ini memaparkan mengenai gambaran umum dari Bali Democracy Forum yang mencakup gambaran kegiatan, tujuan, dan sasaran dari Bali Democracy Forum.

4.2 Pelaksanaan Bali Democracy Forum

Sub bab ini memaparkan sejarah Bali Demokrasi Forum dari tahun ke tahun untuk menggambarkan bagaimana dinamika dalam Bali Democracy Forum. Bagian ini akan mencakup pelaksanaan, data peserta, dan hasil dari Bali Democracy Forum di setiap tahunnya.

4.3 Urgensi Bali Democracy Forum di Era Pandemi Covid-19

Sub bab ini memaparkan tentang pentingnya Bali Democracy Forum untuk tetap dilaksanakan di era pandemi meskipun dibatasi oleh berbagai hal untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Bagian ini akan memaparkan alasan dan urgensi hadirnya Bali Democracy Forum di era pandemi.

4.4 Strategi Diplomasi Publik Indonesia melalui Bali Democracy Forum di Era Pandemi

Sub bab ini memaparkan mengenai bagaimana strategi yang dijalankan oleh Bali Democracy Forum untuk menyiasati keadaan dunia yang sedang berhadapan dengan pandemi agar tetap dapat menjalankan diplomasi publiknya. Bagian ini juga mencakup pelaksanaan, perubahan, dan hasil dari strategi diplomasi publik yang dijalankan pada Bali Democracy Forum di era pandemi.

4.5 Bali Democracy Forum Pasca Pandemi COVID-19

Sub bab ini memaparkan mengenai rencana keberlanjutan Bali Democracy Forum setelah pandemi dengan sistem dan pelaksanaan yang telah berubah ketika pandemi berlangsung. Bagian ini akan memaparkan hasil dari Bali Democracy Forum di era pandemi dan peluang dari Bali Democracy Forum di tahun-tahun selanjutnya.

Bab V Penutup

Bab kelima ini berisi penutup dari penelitian yang dilakukan mencakup kesimpulan dan saran terkait penelitian dan penulisan ini. Bagian ini berupaya memberi ringkasan hasil yang objektif dari penelitian yang telah dilakukan untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini. Saran yang disampaikan mencakup hambatan dan kekurangan selama pembuatan penelitian serta solusi yang dapat dilakukan untuk membantu penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Bagian ini berisi daftar referensi penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini. Bagian ini berasal dari buku, jurnal, media, dan berbagai referensi lainnya yang memiliki hubungan dengan diplomasi publik Indonesia melalui Bali Democracy Forum yang merupakan topik yang dipaparkan dalam penelitian skripsi ini.